



KRI DR WAHIDIN SUDIROHUSODO BERI LAYANAN PENGOBATAN GRATIS

KRI dr Wahidin Sudirohusodo saat bersandar di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (8/12). KRI dr Wahidin Sudirohusodo-991 yang dioperasikan sebagai kapal bantu rumah sakit pertama buatan PT Pal Indonesia tersebut disiapkan untuk memberikan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat selama penyelenggaraan Hari Nusantara di Kota Tidore Kepulauan pada 10-13 Desember 2023.

LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU

Dishub Banten Batasi Pergerakan Truk Besar di Jalan Nasional dan Tol

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus melakukan berbagai persiapan menghadapi momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Mulai mengenai pembatasan angkutan truk besar dan sumbu tiga yang melewati jalan nasional, tol hingga yang akan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak.

SERANG (IM) - Dinas Perhubungan (Dishub) Banten pada momentum libur Natal dan Tahun Baru akan membatasi pergerakan kendaraan mobil truk besar dan sumbu tiga disejumlah ruas jalan khususnya jalan nasional dan tol.

Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo mengatakan, kebijakan itu dilakukan guna mengantisipasi kepadatan pada momentum tahunan itu. Pembatasan sendiri akan dilakukan pada tanggal 24-25 Desember 2023. Serta pada arus baliknya.

"Kita sudah melakukan berbagai koordinasi dan persiapan dalam rangka menghadapi momen Nataru, mulai mengenai pembatasan angkutan truk besar dan sumbu tiga

yang melewati jalan nasional, tol hingga yang akan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak," ucap Tri dalam diskusi di plaza aspirasi KP3B, Kota Serang, Kamis.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus melakukan berbagai persiapan menghadapi momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Pihaknya pun memberikan perhatian khusus terhadap 6 prasarana perhubungan menjelang Nataru, mulai dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak serta Jalan Tol Serang-Rangkasbitung.

"Tentu kita juga memperhatikan prasarana penghubung Jalan Non Tol Tangerang-Merak, Pelabuhan

Penyebrangan Merak dan jaringan menuju kawasan wisata Anyer-Carita-Labuan," ungkap Tri Nurtopo.

Dishub memprediksi akan ada peningkatan jumlah wisatawan atau kendaraan yang melewati Provinsi Banten. Untuk mengantisipasi kepadatan tersebut, Pemprov Banten bersama stakeholder terkait akan melakukan beberapa skenario pengaturan jalur lalu lintas.

Lebih lanjut, Tri Menuturkan saat ini telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: KP-DRJD 8298 Tahun 2023, SKB: 218/XII/2023, dan Nomor: 19/

PKS/Db/2023 oleh Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian PUPR tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Untuk memastikan itu berjalan dengan baik, lanjut Tri, pihak ASDP Merak juga akan menutup akses pemesanan tiket, serta akan melakukan penyetopan pada jenis-jenis kendaraan yang dilarang pada SKB tersebut.

"Kita sudah siapkan 18 posko dengan 180 personil yang akan mobile di lapangan,

bergantian, termasuk untuk posko di titik-titik tempat keramaian wisatawan," ujarnya.

Tri juga mengungkapkan untuk jalur wisata, baik wisata Anyer-Carita-Labuan dan wisata Banten Selatan, pihaknya akan melakukan pemantauan dan menyiapkan petugas di sejumlah titik yang berpotensi timbulkan kemacetan.

"Seperti untuk jalur wisata Anyer, kita juga akan mengalihkan kepada jalur alternatif melalui rute Gunung Sari maupun rute Ciomas," imbuhnya. • pra

Buka Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan, Sekda: Jangan Ada Joki dan Percaloan

TANGERANG (IM) - Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Maesyid Rasyid membuka kegiatan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan yang dilaksanakan di Diklat Kiri Tribakti Curug, Kabupaten Tangerang.

Pada kesempatan tersebut, Sekda berpesan kepada panitia dan seluruh peserta seleksi untuk percaya diri dan jujur sehingga hasilnya nanti benar-benar sesuai dengan kemampuan dan kompetensi peserta.

"Saya tekankan kalian harus percaya diri dengan kemampuan diri sendiri, jangan berharap pertolongan apalagi menggunakan percaloan karena ini menggunakan CAT langsung," ungkapnya.

Dirinya pun berharap semua peserta seleksi dalam kondisi terbaiknya sehingga dapat mengerjakan seluruh tahapan

seleksi dengan prima.

"Selamat mengikuti seleksi, ikuti aturan yang ada dan percaya diri akan kemampuan kalian dengan sungguh-sungguh, insya Allah kalian akan berhasil," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Hendar Herawan mengungkapkan seleksi tersebut diikuti oleh 1.022 orang dari total keseluruhan 1.143 orang, dan dari jumlah tersebut terdapat 121 orang yang mengikuti seleksi di titik lokasi terdekat dari domisilinya masing-masing.

"Dalam seleksi ini tercatat ada 1.022 orang yang tes di Gedung Diklat Kiri Bhakti dari 1.143 orang peserta. Sisa dari total keseluruhannya telah dan akan melaksanakan seleksi di titik lokasi terdekat dari tempat domisilinya masing-masing sesuai dengan jadwal daerahnya, misalkan ada orang Medan dia melamar jadi PPPK tenaga kesehatan di Kabupaten Tangerang, maka yang bersangkutan akan melaksanakan seleksinya di titik lokasi BKN Medan," katanya.

Hendar Herawan melanjutkan formasi yang dibutuhkan untuk tenaga kesehatan sebanyak 231 orang dan pelaksanaan seleksinya dilakukan selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 28 hingga 30 November dengan 3 sesi perharinya.

"Formasi untuk tenaga kesehatan ada 231 orang, jadi seluruh peserta ini harus bersaing satu sama lain, untuk pelaksanaan tes CAT nya sendiri setiap harinya ada 3 sesi, satu sesi nya sebanyak 130 orang dengan mengerjakan 245 soal dalam waktu 130 menit dan bentuk soalnya berupa pilihan ganda," pungkasnya. • pp

Pemilihan Ketua RW di Kota Tangerang Kisruh, Warga Geruduk Kantor Lurah

TANGERANG (IM) - Pemilihan Ketua RW 10, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, kisruh. Pemicunya, warga menolak tata cara pemilihan RW dilakukan mengacu aturan Perwal Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2015.

Warga menginginkan pemilihan dilakukan secara langsung. Warga mencurigai adanya kecurangan dalam pemilihan tersebut yang telah diatur. Hal itu agar RW yang terpilih hanya sesuai dengan keinginan segelintir orang, bukan mayoritas warga.

"Jadi semua warga di RW 10 per KK dan per KTP ingin diberi hak suaranya untuk memilih secara langsung," ujar Yahya Majid, tokoh masyarakat setempat sekaligus anggota Panitia Pemilihan RW 10, Jumat (8/12).

Kata Yahya, warga menolak keinginan Kelurahan yang kembali menggunakan Perwal Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3/2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dalam Perwal disebutkan bahwa Ketua RW dipilih oleh pengurus inti RT yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. "Mayoritas warga RW 10 menginginkan pemilihan langsung, karena sudah tidak percaya lagi dengan seluruh Ketua RT di RW 10," sebut Yahya.

Warga yang protes lalu mendatangi kelurahan setempat. Yahya menyebut tujuan masyarakat mendatangi kantor kelurahan dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait pemilihan RW 10 periode 2023-2026 secara netral dan demokratis.

Warga setempat, Sofyan, mengatakan, tidak setuju pemilihan RW di tempatnya menggunakan sistem perwal. Pasalnya, panitia pemilihan yang notabenehnya seluruh Ketua RT, dituding kroni dari Ketua RW yang sebelumnya.

"Kami khawatir, Ketua RW yang terpilih nanti hanya menguntungkan Ketua RW sebelumnya, bukan untuk kepentingan mayoritas warga," terangnya. "Soalnya menurut kami, Ketua RW yang sebelumnya itu punya track record yang buruk, tidak melayani kepentingan masyarakat," sambungnya.

Lurah Sangiang Jaya, Achmad Fariz Firdaus yang dikonfirmasi menuturkan, proses pemilihan RW 10 memang tidak kondusif. Pasalnya, dalam rapat pemilihan RW tersebut, ada anggota panitia yang setuju dan tidak setuju dengan pemilihan RW yang berdasarkan Perwal.

"Sudah empat kali rapat tidak menemui titik temu dan tidak kondusif, tapi kami tegak lurus mengambil keputusan sesuai dengan acuan yang berlaku yakni perwal," pungkasnya. • pp



KEBUN ANGGREK MILIK BUMDES BEROMZET RATUSAN JUTA

Pekerja menata anggrek yang dibudidayakan di rumah kaca Griya Anggrek Singosari, Malang, Jatim, Jumat (8/12). Kebun anggrek seluas 1.000 meter persegi tersebut dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Bersama-Singosari dengan memberdayakan masyarakat sekitar serta bekerja sama dengan perusahaan pembudidaya anggrek sehingga dalam jangka waktu enam bulan omzet yang dihasilkan mencapai Rp195 juta per semester.

Kemiskinan Ekstrem di Kab. Pasuruan Meningkat

PASURUAN (IM) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan menemukan adanya kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,28 persen di Kabupaten Pasuruan pada 2023, hingga persentase pada tahun ini menjadi 9,24 persen dari sebelumnya 8,86 persen pada 2022.

Naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan dipengaruhi beberapa hal mulai dari inflasi yang mengalami kenaikan 0,42 persen, serta daya beli yang menurun.

Apabila dihitung secara real ada 148.620 warga yang masuk kategori miskin pada 2022. Pada 2023, naik 5.470 orang. Jadi, total ada 154.090 warga miskin di Kabupaten Pasuruan.

Ditambah lagi ada penurunan bantuan dari pemerintah bagi keluarga penerima manfaat (KPM), serta bantuan dari pemerintah daerah melalui program-program bantuan masyarakat miskin.

Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto menguraikan, ada

beberapa hal yang memicu kenaikan angka kemiskinan dari penilaian BPS Kabupaten Pasuruan. Salah satunya karena acuan inflasi yang digunakan bukanlah inflasi di Kabupaten Pasuruan. BPS mengacu pada inflasi di Probolinggo.

"Kami bukan mencari alasan. Kami juga sudah sampaikan ke BPS. Acuan yang mereka gunakan adalah Probolinggo, bukan Kabupaten Pasuruan," katanya, Jumat (8/12) siang.

Andriyanto menegaskan, sudah meminta OPD terkait untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan pemberian pelatihan oleh Disperindag Kabupaten Pasuruan atau pembangunan RTLH bagi masyarakat yang memiliki hunian tak layak, serta upaya-upaya yang lainnya.

"Yang jelas nantinya kami akan upayakan untuk kerjasama yang konkret, sehingga, mendorong kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan rumah layak huni," pungkasnya. • pra

Belasan Ribu Warga Kota Bandung Ajukan Advokasi ke Satgas Antirentenir

BANDUNG (IM) - Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna menegaskan, dalam menyelesaikan masalah jeratan rentenir harus dilakukan secara keroyokan. Bukan hanya untuk membebaskan, tapi juga melatih agar masyarakat berdaya supaya memiliki kemampuan menopang kehidupan.

"Harus keroyokan menangani hal rentenir. Rentenir memang identiknya dengan persoalan keuangan. Tapi setelah itu, masyarakat harus berdaya. Maka dari itu butuh banyak stakeholder terkait," kata Ema Sumarna saat meresmikan Kampung Bersih Rentenir (KBR) di RW 11 Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Jumat (12/12).

la menuturkan, rentenir itu ibarat senja. Awalnya begitu menggoda seperti diberikan cahaya kehidupan. Seiring dengan waktu, senja itu menjadi redup dan gelap.

"Dari pinjam Rp3 juta, jadi hilang tempat tinggal karena harus bayar utang yang sudah berbunga sampai Rp500 juta. Bunganya menjerat hingga mematikan kehidupan orang. Ada kasus karena terjatuh rentenir sampai mengakhiri hidup lebih cepat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM), Atet Dedi Handiman menuturkan, tercatat sekitar 14.506 warga Kota Bandung mengajukan advokasi ke Satgas Antirentenir. Terlebih di tengah berkembangnya teknologi, permasalahan lebih kompleks dengan adanya pinjaman online (pinjol).

"Kita terus upayakan peningkatan ekonomi dan edukasi untuk akses pinjaman yang legal. Sampai saat ini sudah ada dua kecamatan yang memiliki KBR, yaitu Ujungberung dan Sukajadi," kata Atet. • pra

Pj Bupati Lebak Ajak ASN Tertib Bayar Pajak untuk Optimalisasi PAD

LEBAK (IM) - Penjabat Bupati Lebak, Iwan Kurniawan mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan stake holders berkomitmen untuk tertib membayar pajak sebagai upaya dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

"Mari kita berkomitmen mengoptimalkan bersama untuk pendapatan daerah melalui pajak. Mari kita bersama-sama mempunyai rasa tanggungjawab terhadap pembangunan Kabupaten Lebak," kata Iwan saat membuka secara resmi

Rapat Kerja Satuan Gugus Tugas Optimalisasi Pendapatan Daerah sekaligus pemberian penghargaan apresiasi wajib pajak daerah tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak di Aula Multatuli Setda Kabupaten Lebak, Jumat (8/12).

Menurut Iwan, optimalisasi pendapatan daerah wajib dilakukan mengingat selain dalam rangka guna meningkatkan pembangunan di Kabupaten Lebak yang kebermanfaatannya juga akan dirasakan masyarakat.

"Buktikan ASN saat terdapat pajak dan buktikan bahwa kita memiliki komitmen untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang tentunya dari, untuk dan oleh masyarakat ataupun jajaran pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan di

tiap kecamatan. Namun akan lebih baik lagi jika bisa hadir di kelurahan dengan kolaborasi dari berbagai lini.

"Ada akademisi, lembaga keuangan yang backup, media yang terus menceraikan. Kuncinya masyarakat harus berdaya, kalau tidak, maka akan kembali lagi ke bank emok (rentenir)," ujar dia.

Ia berharap, acara peresmian KBR ini tak hanya dalam konteks seremonial. Pihaknya juga tidak ingin mendengar, sebulan kemudian ternyata masyarakat terjatuh rentenir lagi.

"Harus diberikan pelatihan yang baik. Contoh di Kelurahan Sukagali dan Sukabungah Kecamatan Sukajadi telah berdaya secara ekonomi. Mereka jadi memiliki keterampilan untuk membuat makanan olahan seperti bakso dan nugget," ucapnya.

"Mari kita berkomitmen mengoptimalkan bersama untuk pendapatan daerah melalui pajak. Mari kita bersama-sama mempunyai rasa tanggungjawab terhadap pembangunan Kabupaten Lebak," kata Iwan saat membuka secara resmi

Rapat Kerja Satuan Gugus Tugas Optimalisasi Pendapatan Daerah sekaligus pemberian penghargaan apresiasi wajib pajak daerah tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak di Aula Multatuli Setda Kabupaten Lebak, Jumat (8/12).

Menurut Iwan, optimalisasi pendapatan daerah wajib dilakukan mengingat selain dalam rangka guna meningkatkan pembangunan di Kabupaten Lebak yang kebermanfaatannya juga akan dirasakan masyarakat.

"Buktikan ASN saat terdapat pajak dan buktikan bahwa kita memiliki komitmen untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang tentunya dari, untuk dan oleh masyarakat ataupun jajaran pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan di

tiap kecamatan. Namun akan lebih baik lagi jika bisa hadir di kelurahan dengan kolaborasi dari berbagai lini.

"Ada akademisi, lembaga keuangan yang backup, media yang terus menceraikan. Kuncinya masyarakat harus berdaya, kalau tidak, maka akan kembali lagi ke bank emok (rentenir)," ujar dia.

Ia berharap, acara peresmian KBR ini tak hanya dalam konteks seremonial. Pihaknya juga tidak ingin mendengar, sebulan kemudian ternyata masyarakat terjatuh rentenir lagi.

"Harus diberikan pelatihan yang baik. Contoh di Kelurahan Sukagali dan Sukabungah Kecamatan Sukajadi telah berdaya secara ekonomi. Mereka jadi memiliki keterampilan untuk membuat makanan olahan seperti bakso dan nugget," ucapnya.